



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2023



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diterbitkan.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. RENJA ini merupakan rencana kerja tahunan ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. RENJA diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan acuan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya RENJA tahun 2023 ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika lebih konkrit.

Rencana Kerja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Harapan kami, RENJA ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika,



Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700924 199003 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1. Latar Belakang1

 1.2. Landasan Hukum2

 1.3. Maksud dan Tujuan4

 1.4. Sistematika Penulisan4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 6

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan
 Capaian RENSTRA-PD6

 2.2. Analisi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kab. Kutai Kartanegara15

 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi
 Dan Informatika19

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra Dinas	
Komunikasi dan Informatika	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan	
Informatika.....	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	42
4.1. Program dan Kegiatan	42
BAB V PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2023.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap

memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
	3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA PD

Pelaksanaan kegiatan Diskominfo Tahun 2021 secara umum selaras dengan Renja Dinas Kominfo 2021, demikian juga untuk tahun berjalan yaitu tahun 2021, namun terdapat beberapa Program Kegiatan yang capaiannya kurang maksimal. Adapun Evaluasi terhadap Capaian Program Kegiatan tahun 2021 sebagai Berikut :

1) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (8,57%)

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (50%)

2) Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100%)

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (100%)

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%)
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (100%)

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (100%)

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (66,67%)

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100%)
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (99,33%)
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (81,37%)
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (75,71%)

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100%)
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100%)

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (100%)
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (100%)
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%)

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100%)

- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100%)
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100%)

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelayanan Informasi Publik (100%)
- b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik (76,05%)

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah (100%)
- b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik (100%)
- c. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas (100%)

3) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Layanan Hubungan Media (102,5%)

4) Adapun Faktor – Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Target Kinerja Program Kegiatan antara lain :

- 1) Masih kurang optimalnya Perencanaan Program dan Kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya masih belum optimal

- 2) Ada nya penambahan anggaran di perubahan yg nilainya cukup besar dan hrs dilakukan proses lelang, sehingga pd saat proses lelang tdk memungkinkan utk dilaksanakan. Hal ini berpengaruh pd serapan anggaranMasih Kurangnya SDM baik di Bidang IT maupun di Bidang Layanan Publik
- 3) Adanya perubahan kebijakan maupun strategi dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan pandemi covid 19

4) Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Adanya Permasalahan – Permasalahan diatas, berimplikasi terhadap tidak tercapainya target Kinerja beberapa Program / Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.

5) Kebijakan / tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

- Perlunya telaahan Program/Kegiatan yang menjadi Prioritas
- Pengadaan Infrastruktur Jaringan dan Peningkatan Kualitas Jaringan
- Pengadaan SDM baru khususnya SDM bidang IT
- Perlunya sosialisasi dan koordinasi OPD terkait integrasi dan pengembangan Aplikasi
- Penguatan Mobilitas Pembinaan KIM, Peningkatan kualitas SDM Kim melalui pelatihan dan Bimtek
- Perlunya menjangkau semua media sebagai mitra pemerintah melalui sumber daya yang tersedia
- Perlunya Sosialisasi dan Bimtek / Pelatihan terkait Data Statistik Sektoral

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
dan Pencapaian Renstr-PD s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2022)	
										Target Renja-PD Tahun (2021)	Realisasi Renja-PD Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	91,00	78,43	81,00	84,05	103,77	82,00	84,05	92,36
2	16	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	105	12	21	21	100,00	21	54	51,43
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	35	4	7	7	100,00	7	18	51,43
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	70	8	14	14	100,00	14	36	51,43
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	10	2	3	3	100,00	3	8	80,00
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	984	984	984	984	100,00	984	984	100,00
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	2	3	3	100,00	3	8	53,33

2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
2	16	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	1	2	1	50,00	1	3	60,00
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	75	-	15	15	100,00	10	25	33,33
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Layanan	25	5	5	5	100,00	5	15	60,00
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	225	90	45	45	100,00	15	150	66,67
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	30	5	5	5	100,00	6	16	53,33
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Lembar	350.000	51.850	70000	56.960	81,37	54.460	163.270	46,65
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	Orang/Kali	10.500	2.100	70	53	75,71	2.100	4.253	40,50
2	16	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Berkas	250	58	35	3	8,57	50	111	44,40
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	16	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	60	12	3	3	100,00	12	27	45,00
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	Bulan	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
						2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	Bulan	60		12	12	100,00	12	24	40,00

2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	500	100	100	100	100,00	100	300	60,00
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	Unit	110	22	22	22	100,00	22	66	60,00
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	5	1	3	3	100,00	2	5	100,00
2	16	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	3	1	1	100,00	3	7	46,67
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	Informasi dan Komunikasi Publik	4.200	840	840	840	100,00	840	2.520	60,00
2	16	2	02.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID yang dibina	PPID	290	58	58	58	100,00	58	174	60,00
						Jumlah Pengaduan yang dikelola	Pengaduan	98	24	5	5	100,00	12	41	41,84
2	16	2	02.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor	Laporan	150	35	-	-	-	30	65	43,33
2	16	2	02.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Video yang dikelola	konten Video	600	58	-	-	-	120	178	29,67
						Jumlah Konten Streaming yang dikelola	Konten Streaming	600	240	-	-	-	6	246	41,00
						Jumlah Konten Radio yang dikelola	Konten Radio	600	240	-	-	-	8	248	41,33
2	16	2	02.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	orang	240	50	-	-	-	20	70	29,17
2	16	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Rapat Koordinasi	Kali	30	1	-	-	-	6	7	23,33
2	16	2	02.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Orang yang dibina	Orang	1.000	75	-	-	-	270	345	34,50
2	16	2	0,08402778	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Internal yang dikelola	media	15	3	3	3	100,00	3	9	60,00
2	16	2	0,08402778	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa	Media	15	5	40	41	102,50	20	15	100,00
						Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	Kegiatan	60	200	120	125	104,17	100	60	100,00

2	16	2	02.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Rancangan Regulasi	Rancangan Regulasi	5	0	-	-	-	2	2	40,00
2	16	2	02.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	Kali	45	0	-	-	-	5	5	11,11
2	16	2	02.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	25	1	-	-	-	5	6	24,00
2	16	2	02.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Rapat Koordinasi	Kali	25	-	-	-	-	5	5	20,00
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola e-government	OPD	58	30	58	58	100,00	58	58	100,00
2	16	3	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Server yang dikelola	Server	75	8	1	1	100,00	15	24	32,00
						Jumlah Lisensi	Lisensi	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	16	3	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	Dokumen	6	-	-	-	-	3	3	50,00
2	16	3	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Laporan	Laporan	10	3	3	3	100,00	2	8	80,00
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah desa yang disediakan jaringan internet	Desa	46	-	-	-	-	13	13	28,26
2	16	3	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi	Aplikasi	10	2	6	6	100,00	2	10	100,00
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah ASN Diskominfo yang mengikuti Diklat GCIO	Orang	30	-	-	-	-	6	6	20,00
2	16	3	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah OPD	OPD	58	30	-	-	-	58	88	151,72
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	Sistem Informasi	100	-	-	-	-	100	100	100,00
2	16	3	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan jaringan OPD	OPD	100	10	-	-	-	20	30	30,00
						Jumlah Kapasitas Bandwith	Mbps	2.000	300	-	-	-	400	700	35,00
						Jumlah BTS yang dipelihara	BTS	110	22	-	-	-	22	44	40,00

2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		Nilai									
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00	
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	OPD	58	58	58	58	100,00	58	58	100,00	
2	20	2	2.01	01	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	Dokumen	5	1	2	1	50,00	1	3	60,00	
2	20	2	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimtek/Diklat	Peserta	680	110	-	-	-	130	240	35,29	
2	20	2	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Metadata	Dokumen	5	-	-	-	-	1	1	20,00	
2	20	2	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Perangkat Pendukung Statistik Sektoral	unit	10	-	-	-	-	9	9	90,00	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		Nilai									
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	100	-	-	-	-	18,97	18,97	100,00	
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	OPD	58	-	-	-	-	11	11	18,97	
2	21	2	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan	Dokumen	5	-	-	-	-	1	1	20,00	
						Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	Orang	10	-	-	-	-	2	2	20,00	
2	21	2	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang menggunakan sertifikat elektronik	OPD	58	-	-	-	-	11	11	18,97	
2	21	2	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Layanan	5	-	-	-	-	1	1	20,00	
						Jumlah Pelaksanaan Indeks KAMI	Kali	5	-	-	-	-	1	1	20,00	
2	21	2	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Regulasi Keamanan Informasi	Rancangan Regulasi	3	-	-	-	-	1	1	33,33	
2	21	2	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	Layanan JKS	5	-				1	1	20,00	
2	21	2	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	Layanan	5	-	-	-	-	1	1	20,00	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berikut capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2021 berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Kutai Kartanegara

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks SPBE		1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota 4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam	3,10	3,10	3,15	3,20	2,48	-	3,15	3,20	
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE			2,96	2,96	3,01	3,06	2,40	-	3,01	3,06	
3	Indeks Domain Layanan SPBE			3,25	3,25	3,30	3,35	3,19	-	3,30	3,35	
4	Indeks Domain Manajemen SPBE			3,05	3,05	3,10	3,15	1,18	-	3,10	3,15	
5	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE			2,81	2,81	2,92	3,03	1,80	-	2,92	3,03	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			82,00	82,00	84,00	86,00	84,05	-	84,00	86,00	
7	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
8	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
9	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
10	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi			18,97	18,97	37,93	56,89	18,97	-	37,93	56,89	

11	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		menyusun perencanaan pembangunan daerah 5. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 6. Tingkat keamanan informasi pemerintah	21	21	21	21	21	-	21	21	
12	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			2	2	2	2	2	-	2	2	
13	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	-	4	4	
14	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			1	1	1	1	1	-	1	1	
15	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah			5	5	5	5	5	-	5	5	
16	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100		100	100	
17	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	12	12	12		12	12	
18	Jumlah Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100		100	100	
19	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola			840	840	840	840	840		840	840	
20	Jumlah OPD yang mengelola e-government			58	58	58	58	58		58	58	
21	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola			100	100	100	100	100		100	100	

22	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia			58	58	58	58	58		58	58	
23	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah			11	11	11	11	4		11	11	
24	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah			1	1	1	1	-		1	1	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) 2021-2026 menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia. Masalah utama dalam Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

a) Urusan Kabupaten Kutai Kartanegara SmartCity.

Secara garis besar pengembangan Smart City di Kabupaten Kutai Kartanegara di era sekarang ini sangat diperlukan guna pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berkaitan dengan pengembangan kota cerdas di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dirancangnya membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya pengelolaan Sumber Daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses dan mendapatkan informasi. Pengembangan aplikasi yang ada pada setiap SKPD untuk dapat mengintegrasikan data layanan informasi.

b) Satu Data Layanan untuk Pembangunan Kutai Kartanegara

Data yang digunakan oleh aplikasi yang saat sekarang dikembangkan di beberapa SKPD belum memiliki keseragaman struktur dikarenakan belum adanya standar baku yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi SKPD dalam membangun/mengembangkan aplikasi yang sesuai kebutuhan masing masing SKPD.

Kondisi ini menjadikan satu kendala tersendiri dalam proses integrasi data. Untuk itu pemerintah harus memiliki standar baku yang disepakati bersama yang dapat dijadikan patokan dalam setiap pembuatan/pengembangan aplikasi di setiap SKPD.

Integrasi data merupakan sebuah proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari berbagai sumber dalam rangka mendukung management Informasi dan mendukung penggunaan untuk melihat kesatuan data.

Integrasi data mengharuskan semua komponen menggunakan sumber data yang sama yang sudah terverifikasi oleh instansi terkait dan menghindari terjadinya duplikasi atau adanya data ganda.

c) Layanan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Layanan Online

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama di segala aspek.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui berbagai aplikasi yang bersifat On-Line.

d) Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dengan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Setiap informasi publik bersifat terbuka yang dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program dan proses serta alasan pembuatan kebijakan publik. Mendorong dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang baik, seperti yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.

e) Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tingginya kebutuhan informasi yang ingin didapatkan oleh masyarakat dewasa ini, dengan difasilitasi oleh kecanggihan teknologi, alat komunikasi, kemudahan akses internet melalui jaringan free WiFi dan jaringan 4G, alat teknologi penunjang kemudahan transaksi dan kemampuan bertukar data digital secara jarak jauh melalui internet menjadi salah satu ciri bahwa masyarakat kita sedang memasuki tahap sebagai masyarakat informasi. Ini adalah salah satu bukti tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

- Kurangnya Sumber Daya Spesifik IT (Programmer, Engineer Network / Hardware / System, Quality Control)
- Kondisi Infrastruktur IT yang sebagian besar sudah berumur diatas umur Teknis (10-15 tahun)
- Belum tersedianya Sistem Keamanan Informasi

- Belum Terstandarisasinya Perangkat Lunak dan Terintegrasinya Aplikasi (Sistem dan Database)
- Belum terwujudnya Fungsi Wali Data (Informasi Satu Data)
- Belum terwujudnya fungsi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara komperhensif

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Capaian Program Nasional/ Internasional, SPM dan MDGs.

Tabel 2.3
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
	MISI 1 : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;			

1	Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)	1. Masih terdapat desa Blankspot diakibatkan dari tidak meratanya pemabngunan infrastruktur jaringan 2. Belum terintegrasinya aplikasi yang ada di Perangkat Daerah 3. Masih kurangnya SDM khususnya di Bidang IT 4. Masih belum maksimalnya pemanfaatan Sistem Informasi yang ada di Kecamatan, Desa dan Kelurahan 5. Belum tersedianyan rancangan masterplan pelaksanaan pelayanan pemerintahan berbasis digital untuk mendukung pelaksanaan RPJMD 2021 - 2026	1. Tidak meratanya pembangunan menara telekomunikasi oleh stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi. 2. 23 desa masih berstatus blankspot. 3. Masih kurangnya koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi 4. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan Sistem Informasi	1. Terdapat 21 menara telekomunikasi/tower milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Telah terbangun 277 menara telekomunikasi/tower milik provider yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara . 3. Telah terhubung jaringan internet di 216 desa/kelurahan dari 237 desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
	MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Unggul dan Berbudaya			

1	Program Keluarga Peduli Kesehatan	Belum adanya aplikasi yang mendukung kebijakan pemberian BPJS bagi warga pra sejahtera	BELUM ADANYA BISNIS PROSES MAUPUN DATABASE WARGA PRASEJAHTERA.	1. TERSEDIANYA APLIKASI E-WARGA YANG DAPAT DIKEMBANGKAN UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMBERIAN BPJS BAGI WARGA PRASEJAHTERA; 2. TERSEDIANYA API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE) DARI DISDUKCAPIL YANG DAPAT DIMANFAATKAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMBERIAN BPJS BAGI WARGA PRA SEJAHTERA BERBASIS NIK.
	MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah			
1	Program Pemantapan Konektivitas Wilayah	Masih terdapat desa Blankspot diakibatkan dari tidak meratanya pemabngunan infrastruktur jaringan	1. Tidak meratanya pembangunan menara telekomunikasi oleh stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi. 2. 23 desa masih berstatus blankspot. 3. Masih kurangnya koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi	1. Terdapat 21 menara telekomunikasi/tower milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Telah terbangun 277 menara telekomunikasi/tower milik provider yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara . 3. Telah terhubung jaringan internet di 216 desa/kelurahan dari 237 desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan Dsikominfo Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

- Pesatnya kemajuan dalam bidang TIK tidak dapat diimbangi dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mempunyai, sehingga pelayanan informasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara, dan masyarakat kurang optimal;
- Minimnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menunjang kinerja birokrasi yang cepat, tepat dan berdaya guna.
- Belum Optimalnya Fungsi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara komperhensif
- Belum optimalnya pendataan Statistik Sektoral

Adapun Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dsikominfo Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

- Adanya peluang recruitment SDM IT
- Adanya peluang peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
- Adanya peluang optimalisasi Fungsi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara komperhensif
- Perlu adanya pendataan Statistik Sektoral secara komperhensif

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

Dari penjabaran isu – isu penting diatas dapat di rekomendasikan hal – hal sebagai berikut :

- Perlunya Recruitment Sumber Daya Spesifik IT
- Revitalisasi Infrastruktur dan Perangkat Keras IT serta Penerapan Pengamanan Sistem Informasi
- Membuat Regulasi tentang Standarisasi Perangkat Lunak dan Keras serta Perlakuan Integrasi Sistem dan Database
- Membangun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara Komperhensif

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara pada tahun 2023

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara tahun 2023 pada tabel dibawah ini :

TABEL T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisi Kebutuhan					
NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,00 Nilai	15.984.481.540	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,00 Nilai	17.263.382.349	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	200.000.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	200.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100.000.000	Penyesuaian Target Indikator
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	14 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	9 Laporan	100.000.000	Penyesuaian Target Indikator

			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2 Laporan	11.006.217.716	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2 Laporan	11.585.118.525	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	984 Orang/Bulan	10.694.925.552	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	984 Orang/Bulan	11.273.826.361	Hasil rekonsiliasi BPKAD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	311.292.164	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	311.292.164	Penyesuaian Target Indikator
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	125.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	125.000.000	
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	125.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	125.000.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000	
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	5 Layanan	470.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	5 Layanan	470.000.000	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	

10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	200.000.000	
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	70.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	70.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	450.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	450.000.000	
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.001.463.824	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.001.463.824	

14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.100.000	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	742.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	742.000.000	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.254.363.824	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.254.363.824	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	100 Unit	581.800.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	100 Unit	1.281.800.000	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	131.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	131.800.000	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	850.000.000	

19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	300.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	100 Persen	2.605.357.333	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	100 Persen	3.405.357.333	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	840 Informasi dan Komunikasi Publik	2.605.357.333	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	840 Informasi dan Komunikasi Publik	3.405.357.333	
20	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	500.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	500.000.000	
21	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	200.000.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	200.000.000	
22	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	300.000.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	300.000.000	

23	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	6 Dokumen	300.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	6 Dokumen	300.000.000	
24	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	200 Dokumen	300.000.000	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	150 Dokumen	300.000.000	Penyesuaian target Indikator
25	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	200.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	200.000.000	
26	Layanan Hubungan Media	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	530.357.333	Layanan Hubungan Media	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Layanan Hubungan Media	10 Layanan	1.330.357.333	Tambahan Pokir 7 Paket Pekerjaan
27	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	75.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	75.000.000	
28	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	100.000.000	

29	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
30	Manajemen Komunikasi Krisis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	50.000.000	Manajemen Komunikasi Krisis	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	50.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100 Persen	12.033.827.670	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100 Persen	12.033.827.670	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang mengelola e-government	58 OPD	4.130.967.000	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang mengelola e-government	58 OPD	4.130.967.000	
31	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1.640.688.158	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1.640.688.158	
32	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	200.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	200.000.000	

33	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	1.765.278.842	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	1.765.278.842	
34	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	175.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	175.000.000	
35	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	6 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	6 Dokumen	100.000.000	
36	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	250.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	250.000.000	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	100 Sistem Informasi	7.902.860.670	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	100 Sistem Informasi	7.902.860.670	
37	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	23 Unit	7.902.860.670	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	23 Unit	7.902.860.670	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.450.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.450.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	100 Persen	1.450.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	100 Persen	1.450.000.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	58 OPD	1.450.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	58 OPD	1.450.000.000	
38	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	500.000.000	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	400.000.000	Pagu anggaran dialihkan sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
39	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	136 Orang	250.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	130 Orang	250.000.000	Penyesuaian Target Indikator
40	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	200.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	200.000.000	

41	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Infrastruktur Statistik	5 unit	500.000.000	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Infrastruktur Statistik	18 unit	400.000.000	Pagu anggaran dialihkan sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah
42	-	-	-	-	-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	116 Orang	100.000.000	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral melalui pelatihan statistik sektoral dari BPS tentang penyusunan Satu Data Kukar dan Pemenuhan IKK output bidang statistik yakni pembinaan terkait rekomendasi survey dan kegiatan statistik sektoral yang belum terakomodir pada tahun 2021
43	-	-	-	-	-	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang dihimpun	2 Dokumen	100.000.000	Output dari sub kegiatan ini adalah dokumen data statistik daerah yang dihimpun, diolah dan disebarluaskan oleh Diskominfo sebagai walidata yakni dokumen buku profil daerah yang

											belum terakomodir pada tahun 2021 sebagai pemenuhan IKK Output bidang Statistik
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				700.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				700.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	18,97 Persen	700.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	18,97 Persen	700.000.000	
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	11 OPD	500.000.000	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	11 OPD	500.000.000	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	200.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	200.000.000	

								Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	150.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	150.000.000	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota		Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	200.000.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota		Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	200.000.000	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	200.000.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	200.000.000	
	Total				32.773.666.543					34.852.567.352	

2.5 Penelaahan Program Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Untuk tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memiliki usulan dari Pemangku Kepentingan tahun 2023

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Repeater/Vsat di Desa	Desa Sebulu Ilir Kec. Sebulu	Jumlah Unit Jaringan Internet	1 Unit	Belum adanya jaringan Internet yang masuk di lingkungan Kantor Desa
2	Perangkat Peliputan dan Produksi Konten	Desa Kota Bangun III Kec. Kota Bangun	Jumlah Alat Peliputan	1 Paket	Belum ada Alat Peliputan Konten
3	Perangkat Peliputan dan Produksi Konten	Desa Loa Ulung Kec. Tenggarong Seberang	Jumlah Alat Peliputan	1 Paket	Belum Tersedianya Fasilitas Pembuatan Video/Filem Promosi Pariwisata Pesona Kecamatan (Bantuan Pengadaan Fasilitas Pembuatan Video/Filem Desa Loa Ulung)
4	Perangkat Peliputan dan Produksi Konten	Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang	Jumlah Peserta Pelatihan	10 Orang	Pelatihan dan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa (Belum terbentuknya PPID Desa dan pemahaman terkait PPID Desa)
5	Perangkat Peliputan dan Produksi Konten	Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang	Jumlah Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Minimnya pemahaman tentang sistem informasi desa sehingga pengaturan manajemennya belum berjalan dengan teratur)
6	Perangkat Peliputan dan Produksi Konten	Desa Kahala Ilir Kec. Kenohan	Jumlah Alat Peliputan	1 Paket	Perlunya perangkat peliputan dan produksi konten untuk memperkenalkan potensi desa
7	Pengadaan Repeater/Vsat di Desa	Desa Tani Baru Kec. Anggana	Jumlah Unit Jaringan Internet	1 Unit	Jaringan Telepon Hanya Di Beberapa Titik (Spot), Kualitas Internet Yang Rendah
8	Kerjasama Media (Online/Cetak/Radio/Videotron/TV)	Desa Rempanga Kec. Loa Kulu	Jumlah Alat Peliputan	1 Paket	Pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Loa Kulu perlu dipublikasikan sehingga dapat memotivasi setiap perkembangannya. Oleh karena itu mengajukan permohonan adanya kerja sama peliputan dan publikasi atas perkembangan desa-desa di kawasan perdesaan di Kecamatan Loa Kulu

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum nasional bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam dokumen Rensta Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
2.	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
3.	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
4.	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
5.	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
6.	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
7.	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menyesuaikan atau mensinkronisasi dalam berbagai kebijakan strategis yaitu melalui Program :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara..

3.2.1 Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah "Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)".

3.2.2 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE
2. Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE
3. Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE
4. Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

a) Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 adalah Visi Bupati Kutai Kartanegara “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Untuk mencapai Visi tersebut maka dilakukan berbagai upaya strategis, salah satu upaya itu dituangkan dalam Sasaran RPJMD Kabupaten kutai Kartanegara. Dalam Sasaran RPJMD, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 Tujuan dan 4 Sasaran yang sudah ditetapkan melalui turunan Sasaran RPJMD Kabupaten antara lain :

Tujuan :

”Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE
2. Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE
3. Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE
4. Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE

b) Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Program yang direncanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Rutin dan 4 (empat) Program Urusan Pemerintahan. Rincian Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Dari 5 (lima) Program diatas, dijabarkanlah ke dalam bentuk Kegiatan dan Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 14 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif).

Kebutuhan dana pagu dari seluruh Program / Kegiatan tersebut pada tahun 2023 sebesar **Rp. 33.352.567.353,- (Tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah)**

- c) Rumusan Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD tidak ada, semua mengacu kepada Rancangan Awal RKPD
- d) Tabel Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
					Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE		3,15 Nilai				3,20 Nilai	
					Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE		3,01 Nilai				3,06 Nilai	
					Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE		3,30 Nilai				3,35 Nilai	
					Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE		3,10 Nilai				3,15 Nilai	
					Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE		2,92 Nilai				3,03 Nilai	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		82,00 Nilai	17.263.382.349			84,00 Nilai	15.984.481.540
2	16	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13 Dokumen	200.000.000			18 Dokumen	200.000.000
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	4 Dokumen	100.000.000	APBD		6 Dokumen	100.000.000

2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	9 Laporan	100.000.000	APBD		12 Laporan	100.000.000
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		2 Laporan	11.585.118.525			2 Laporan	11.006.217.716
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	984 Orang/Bulan	11.273.826.361	APBD		984 Orang/Bulan	10.694.925.552
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	4 Laporan	311.292.164	APBD		4 Laporan	311.292.164
2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		4 Dokumen	125.000.000			4 Dokumen	125.000.000
2	16	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	4 Laporan	125.000.000	APBD		4 Laporan	125.000.000
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	150.000.000
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	10 Orang	150.000.000	APBD		10 Orang	150.000.000
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah		5 Layanan	470.000.000			5 Layanan	470.000.000

2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta, Semua Kecamatan	50 Laporan	200.000.000	APBD		50 Laporan	200.000.000
2	16	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	1 Dokumen	70.000.000	APBD		1 Dokumen	70.000.000
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100 Persen	450.000.000			100 Persen	450.000.000
2	16	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	1 Unit	250.000.000	APBD		1 Unit	250.000.000
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	16 Unit	200.000.000	APBD		25 Unit	200.000.000
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	3.001.463.824			12 Bulan	3.001.463.824
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	1 Laporan	5.100.000	APBD		1 Laporan	5.100.000

2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	1 Laporan	742.000.000	APBD		1 Laporan	742.000.000
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong	3 Laporan	2.254.363.824	APBD		3 Laporan	2.254.363.824
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		100 Unit	1.281.800.000			100 Unit	581.800.000
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tenggarong	22 Unit	131.800.000	APBD		22 Unit	131.800.000
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong	1 Unit	850.000.000	APBD		1 Unit	150.000.000
2	16	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong	15 Unit	300.000.000	APBD		15 Unit	300.000.000
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik		100 Persen	3.405.357.333			100 Persen	2.605.357.334
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola		840 Informasi dan Komunikasi Publik	3.405.357.333			840 Informasi dan Komunikasi Publik	2.605.357.334
2	16	2	02.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Semua Kecamatan	5 Dokumen	500.000.000	APBD		5 Dokumen	300.000.000

2	16	2	02.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tenggarong	2 Dokumen	200.000.000	APBD		2 Dokumen	200.000.000
2	16	2	02.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tenggarong, Samarinda	4 Dokumen	300.000.000	APBD		3 Dokumen	300.000.000
2	16	2	02.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	APBD	-	120 Orang	250.000.000
2	16	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Tenggarong, Ma. Badak, Ma. Kaman	6 Dokumen	300.000.000	APBD		6 Dokumen	300.000.000
2	16	2	02.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Tenggarong, Ma. Badak, Ma. Muntai, Loa Janan, Kota Bangun	150 Dokumen	300.000.000	APBD		200 Dokumen	300.000.000
2	16	2	02.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tenggarong	3 Dokumen	200.000.000	APBD		3 Dokumen	200.000.000
2	16	2	02.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Tenggarong, Samarinda	10 Layanan	1.330.357.333	APBD		5 Layanan	530.357.334
2	16	2	02.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tenggarong	1 Dokumen	75.000.000	APBD		1 Dokumen	75.000.000
2	16	2	02.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tenggarong	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
2	16	2	02.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Tenggarong	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000

2	16	2	02.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Tenggarong	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD		100 Persen	12.033.827.670			100 Persen	12.033.827.670
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola e-government		58 OPD	4.130.967.000			58 OPD	4.130.967.000
2	16	3	02.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Tenggarong	1 Unit	1.640.688.158	APBD		1 Unit	1.890.688.158
2	16	3	02.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jakarta, Tenggarong	2 Dokumen	200.000.000	APBD		2 Dokumen	200.000.000
2	16	3	02.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Desa Lamin Telihan, Desa Sepatin, Menamang Kiri	3 Dokumen	1.765.278.842	APBD	Program Dedikasi Kukar Idaman 17. Program Pemantapan Konektivitas Wilayah	3 Dokumen	1.515.278.842
2	16	3	02.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Ma. Muntai, Ma. Jawa, Samboja, Muara Badak, Sebulu, Ma. Kaman, Loa Janan, Anggana, Kota Bangun, Sanga - Sanga	2 Unit	175.000.000	APBD		2 Unit	175.000.000
2	16	3	02.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Yogyakarta	6 Dokumen	100.000.000	APBD		6 Dokumen	100.000.000
2	16	3	02.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Samarinda, Tenggarong	1 Dokumen	250.000.000	APBD	Program Dedikasi Kukar Idaman 1.	1 Dokumen	250.000.000

[illegible]

2	20	2	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang dihimpun	Tenggarong	2 Dokumen	100.000.000	APBD		-	-
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				700.000.000				850.000.000
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi		18,97 Persen	700.000.000			18,97 Persen	850.000.000
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah		11 OPD	500.000.000			11 OPD	650.000.000
2	21	2	02.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Yogyakarta	1 Laporan	150.000.000			1 Laporan	150.000.000
2	21	2	02.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Semua Kecamatan	1 Laporan	200.000.000			1 Laporan	200.000.000
2	21	2	02.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Tenggarong	1 Perangkat Daerah	150.000.000			1 Perangkat Daerah	150.000.000
2	21	2	02.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Kutai Kartanegara	-	-			1 Dokumen	150.000.000
2	21	2	02.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah		1 Layanan JKS	200.000.000			1 Layanan JKS	200.000.000

2	21	2	02.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Tenggarong	1 Perangkat Daerah	200.000.000			1 Perangkat Daerah	200.000.000
TOTAL									34.852.567.352	-			32.923.666.543

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2023 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja (Renja) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;

7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government and good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

4.3. RencanaTindakLanjut.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 berlaku sejak tanggal di tetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Tenggarong, 10 Agustus 2022

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika,

Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700924 199003 1 001

Nama	Jabatan	Paraf
SOLIHIN, S.Sos., MT	Sekretaris	
Maulida Savitri, SP	Plt. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JalanPahlawan No. 1 Bukit Biru☎ (0541) 661350,Fax.(0541) 661834 KodePos 75511

Website :diskominfo.kutaikartanegarakab.go.od Email : diskominfo@kutaikartanegarakab.go.id

T E N G G A R O N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 088/SK-DISKOMINFO/02/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023**
- KESATU :** Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum pada Lampiran Keutusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dan menyusun serta membantu segala yang dibutuhkan baik data maupun informasi serta kebutuhan lainnya dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 21 Februari 2022

KEPALA

Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700924 199003 1 001



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KAB. KUTAI KARTANEGARA
NOMOR :
TANGGAL : 21 Februari 2022

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	DAFIP HARYANTO,S.Sos,M.Si NIP. 19700924 199003 1 001	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	SOLIHIN, S.Sos. MT Nip. 19721029 199102 1 001	Sekretaris	Ketua
3.	MAULIDA SAVITRI, SP Nip. 19790203 200801 2 025	Plt. Kasubbag Penyusunan Program Dan Keuangan	Sekretaris
4.	ERY HARIYONO, SE, M.Si Nip. 19791029 201001 1 004	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
5.	TANTRI SAPTA DEWI, ST Nip. 19740922 200801 2 011	Plt. Kepala Bidang E- Government	Anggota
6.	AHMAD RIAN TO,SIP Nip. 19660116 199403 1 006	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Anggota
7.	H. SURYA ADMAJA, SP Nip. 19700402 199912 1 002	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Layanan Publik	Anggota
8.	H. ASDI, SE. MAP Nip. 19690313 200112 1 001	Kepala Bidang Statistik	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KAB. KUTAI KARTANEGARA


Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP: 19700924 199003 1 001